



**KABUPATEN BADUNG**

**RENCANA KERJA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2024**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 87/051/HK/2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Keluaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung .....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung .....	29
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG .....</b>	<b>31</b>
3.1 Tujuan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung .....	31
3.2 Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung .....	31
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG .....</b>	<b>33</b>
Program dan Kegiatan .....	33
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>44</b>

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung s/d Tahun 2023 Kabupaten Badung.....	18
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	38



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 87/051/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bab V. Penutup

KETIGA : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
BUPATI BADUNG,  
  
LINYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 87/051/HK/2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Sebagai perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyusun dokumen perencanaan awal rencana kerja untuk tahun 2024.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana

Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, dimana dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) untuk jangka waktu lima tahun ini akan menjadi acuan dari pada pelaksanaan RKPD, yang ditindak lanjuti menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2023 ini disusun mengacu kepada:

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023
3. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja PD ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum



Anggaran, serta dasar-dasar teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja PD (Renja PD).

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka memberikan arah yang jelas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung menuangkan dalam bentuk perencanaan sebagai proses penyusunan dan penetapan berbagai rencana baik dalam jangka waktu menengah dan jangka waktu pendek, yang akan diimplementasikan pada suatu program dan kegiatan yang diusulkan.

Mengacu pada pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung selaku Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja setiap tahun anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen RENSTRA PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dokumen Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2024 ini menunjuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud dari pada penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung bertujuan untuk :

- Menjabarkan rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan jangka pendek 1 tahun untuk tahun 2024
- Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, serta memperhatikan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
- Menyelaraskan evaluasi kinerja tahun lalu dengan rencana kerja dan renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

### **Tujuan**

Adapun Tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran dan mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan.
3. Sebagai tolok ukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.
4. Menyusun kebijakan dan regulasi daerah tentang pengelolaan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan.
5. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam strategi penyelenggaraan kearsipan dan pelayanan perpustakaan.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2024 terdiri dari lima (5) BAB yaitu :

BAB I.       Pendahuluan terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun Lalu
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Lalu dan Capaian Rentra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
- BAB III. Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
  - 3.1 Tujuan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
  - 3.2 Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
- BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung  
Program dan Kegiatan
- BAB V. Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung**

Sesuai dengan tugas dan Fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung melaksanakan tugas sebagai Lembaga teknis Daerah yang melakukan pengelolaan, pemeliharaan/perawatan, pembinaan serta pelayanan kearsipan dan pelayanan perpustakaan. Terkait dengan hal tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2022 telah melaksanakan tiga program, sepuluh kegiatan, dan dua puluh tiga sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibagi menjadi dua urusan, urusan bidang kearsipan terdiri dari satu program tiga kegiatan dan lima sub kegiatan telah dilaksanakan. Urusan bidang perpustakaan terdiri dari satu program non urusan yang terdiri dari enam kegiatan, empat belas sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Urusan bidang perpustakaan yang menjadi program prioritas terdiri dari satu program, satu kegiatan dan empat sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Program, kegiatan dan sub kegiatan, seperti tertuang di bawah ini :

##### **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

##### **1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan :

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

##### **a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 8.696.250,- terealisasi sebesar Rp. 8.152.688,- atau 93,74 % dengan target kinerja 6 dokumen. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini pada tahun 2026 sebanyak 36 dokumen. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 12 dokumen atau 33,33% dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 6 dokumen diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang menganggarkan honorarium bagi pelaksana kegiatan, dari tahun 2020 tunjangan honorarium bagi pelaksana kegiatan sudah dihapuskan

c. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.112.989,- terealisasi sebesar Rp. 1.966.590,- atau 93,07 % dengan target kinerja 6 laporan. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini pada tahun 2026 sebanyak 36 laporan. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 12 laporan atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 6 laporan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 13.791.711.251,-

teralisasi sebesar Rp. 11.662.560.119,- atau 84,56 % dengan target kinerja 86 orang. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini pada tahun 2026 tetap sebanyak 86 orang. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 86 orang atau 100 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 86 orang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

Kegiatan :

### 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

#### a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10.475.520,- teralisasi sebesar Rp. 9.392.400,- atau 89,66 % dengan target kinerja 1 paket. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 6 paket. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 2 paket atau 33,33% dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 1 paket diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

#### b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada tahun 2022 tidak dianggarkan karena keterbatasan pagu anggaran.

#### c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 70.698.000,- teralisasi sebesar Rp. 68.650.600,- atau 97,10 % dengan target kinerja 4 paket. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 24 paket. Pencapaian target



kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 8 paket atau 33,33% dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 4 paket diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 12.383.335,- terealisasi sebesar Rp. 9.757.800,- atau 78,80 % dengan target kinerja 1 paket. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 6 paket. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 2 paket atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 1 paket diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 83.208.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.750.000,- atau 98,25 % dengan target kinerja 13 dokumen. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 78 dokumen. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 26 dokumen atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 13 dokumen diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun 2021 tidak lagi dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah, penganggarannya telah difokuskan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

Kegiatan :

4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 330.593.211,- terealisasi sebesar Rp. 297.687.000,- atau 90,05 % dengan target kinerja 20 Unit. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 100 Unit. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 20 unit atau 20 % dari pencapaian Renstra. Pada anggaran induk Tahun 2023 belum mengaggarkan target kinerja untuk kegiatan ini, diharapkan pada anggaran perubahan dapat peluang untuk mengajukan anggaran untuk pengadaan peralatan kantor.

Kegiatan :

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 17.290.856,- terealisasi sebesar Rp. 13.320.699,- atau 77,03 % dengan target kinerja 2 laporan. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 12 laporan. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 4 laporan atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 2 laporan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 15.840.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.260.013,- atau 64,77 % dengan target kinerja 12 laporan. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 72 laporan. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 24 laporan atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 12 laporan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100 % dengan target kinerja 2 laporan. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 12 laporan. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 4 laporan atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 2 laporan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

Kegiatan :

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 32.362.500,- terealisasi sebesar Rp. 29.460.900,- atau 91,03 % dengan target kinerja 1 unit. Target pencapaian

Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 1 unit. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 1 unit atau 100 % target pencapaian ini tidak akumulasi dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 1 unit diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 351.879.000,- terealisasi sebesar Rp. 228.864.425,- atau 65,04 % dengan target kinerja 26 unit. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 27 unit. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 26 unit atau 100 % target pencapaian ini tidak akumulasi dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 26 unit diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

c. Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 19.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.625.000,- atau 73,41% dengan target kinerja 35 unit. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 210 unit. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 70 unit atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 35 unit diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 63.186.023,- terealisasi sebesar Rp. 63.183.505,- atau 99,99 % dengan target kinerja 36 layanan. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 204 layanan. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 60 layanan atau 29,41 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 36 layanan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

b. Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.955.794.069,- terealisasi sebesar Rp. 2.874.413.769,- atau 97,24 % dengan target kinerja 1 perpustakaan. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 10 perpustakaan. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 1 perpustakaan atau 16,66 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak tidak ada dianggarkan

c. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 61.808.371,- terealisasi sebesar Rp. 61.775.700,- atau 99,94 % dengan target kinerja 1500 eksemplar. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 9000 eksemplar. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 1500 eksemplar atau 34 % dari

pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 1500 eksemplar diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

- d. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 187.386.714,- terealisasi sebesar Rp. 187.187.066,- atau 99,89 % dengan target kinerja 12 dokumen. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 72 dokumen Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 24 dokumen atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 12 dokumen diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

### **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

1. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan :

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 184.281.149,- terealisasi sebesar Rp. 184.220.666,- atau 99,96 % dengan target kinerja 150 berkas. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 900 berkas. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 300 berkas atau 33,33 % dari pencapaian Renstra.

Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 150 berkas diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 126.980.471,- terealisasi sebesar Rp. 126.964.881,- atau 99,98 % dengan target kinerja 325 berkas. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 1.950 berkas. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 650 berkas atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 325 berkas diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip statis

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip statis dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 182.515.312,- terealisasi sebesar Rp. 182.231.865,- atau 99,84 % dengan target kinerja 1.400 arsip. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 8.400 arsip. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 2.800 arsip atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 1.400 arsip diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 154.215.611,- terealisasi sebesar Rp. 141.423.452,- atau 91,70 % dengan target kinerja 7.000 pengguna. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 28.000 pengguna. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 7.000 pengguna atau 16,66 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 7.000 pengguna diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

a. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 128.373.725,- terealisasi sebesar Rp. 110.256.058,- atau 85,88 % dengan target kinerja 76 laporan. Target pencapaian Renstra untuk kegiatan ini sampai pada tahun 2026 sebanyak 456 laporan. Pencapaian target kinerja sampai tahun 2022 telah mencapai sebanyak 152 laporan atau 33,33 % dari pencapaian Renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja untuk kegiatan ini sebanyak 76 laporan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023  
Kabupaten Badung

Nama PD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)  (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	100%	1,00	100%	200%	2,00
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keseuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	100%	1,00	100%	200%	2,00
2	23	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	36 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1,00	6 Dokumen	10 Dokumen	0,28
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah capaian kinerja SKPD	24 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	23	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	36 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1,00	6 Dokumen	12 Dokumen	0,33
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	1,00	100%	2	2,00
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	88 Orang		86 Orang	86 Orang	1,00	86 Orang	172 Orang	1,95
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	1,00	100%	2	2,00
2	23	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	6 paket		1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	2	0,33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)  (%)
2	23	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	6 paket		-	-	-	1 Paket	1	0,17
2	23	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	17 Jenis		17 Jenis	17 Jenis	1,00	17 Jenis	17	1,00
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	6 paket		1 Paket	1 Paket	1,00	1 Paket	2	0,33
2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	5.400 Eksemplar		1.080 Eksemplar	1.080 Eksemplar	1,00	1.080 Eksemplar	2.160	0,40
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah lpelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	5 LS		-	-	-	1 LS	1	0,20
2	23	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>		-	-	-	-	-	-
2	23	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32 Unit		-	-	-	-	-	-
2	23	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	1,00	<b>100%</b>	2	2,00
2	23	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah sarana jasa surat menyurat	5 Paket		1 Paket	1 Paket	1,00	1 Paket	2	0,40
2	23	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	10 line/telepon		10 line/telepon	10 line/telepon	1,00	10 line/telepon	20	2,00
2	23	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan sarana administrasi umum	8.800 Lembar		1.260 Lembar	2 Laporan	0,00	500 Lembar	502	0,06
2	23	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	1,00	<b>100%</b>	2	2,00
2	23	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	2	2,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)  (%)
2	23	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara	26 Unit		26 Unit	26 Unit	1,00	26 Unit	52	2,00
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Paket		2 Paket	2 Paket	1,00	2 Paket	4	0,40
2	23	02			Program Pembinaan Perpustakaan	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	11,01 Nilai indeks							
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	34.620 Orang							
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah sekolah yang mengikuti penerapan aplikasi inisilite	304 Sekolah		24 Sekolah	24 Sekolah	1,00	76 Sekolah	100	0,33
2	23	02	2.01	02	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah ruanga yang ditata	2 Ruangan		1 Ruangan	1 Ruangan	1,00	1 Ruangan	2	1,00
2	23	02	2.01	04	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/ kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	180 Perpustakaan		-	-	-	-	-	-
2	23	02	2.01	06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	140 Orang		-	-	-	-	-	-
2	23	02	2.01	07	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	90 Layanan		-	-	-	-	-	-
2	23	02	2.01	08	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka tercetak yang dicetak dan diadakan	4.000 Eksemplar		-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)  (%)
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah koleksi yang diolah	7.500 Eksemplar		1.500 Eksemplar	1.560 Eksemplar	-	1.500 Eksemplar	3.060	0,41
2	23	02	2.01	10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	72 Orang		4.360 Orang	1.697 Orang	0,39	12 Orang	1.709	23,74
2	23	02	2.02		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat</b>	63,30							
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	192 Lokus		-	-	-	-	-	-
2	23	02	2.02	03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah orang yang mendapat penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	17 Orang		3 Orang	3 Orang	1,00	-	3	0,18
2	23	02	2.02	04	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan		-	-	-	-	-	-
2	23	03			<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>	<b>Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan</b>	100%							
2	23	03	2.01		<b>Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat</b>	120 Naskah		-	-	-	-	-	-
2	23	03	2.01	01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	8 Orang		-	-	-	-	-	-
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	8 Eksemplar		-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)  (%)
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	2.000 Eksemplar		-	-	-	-	-	-
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	2.000 Eksemplar		-	-	-	-	-	-
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan	1000 Eksemplar		-	-	-	-	-	-
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
2	24	02			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik	34%							
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	75 Unit kearsipan							
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang pilah dan ditata	750 Berkas		1 Unit kerja	1 Unit kerja	1,00	1 Unit kerja	2	0,00
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1625 Box		325 Box	325 Box	1,00	325 Box	650	0,40
2	24	02	2.01	03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	148 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	8400 Arsip		1400 Arsip					
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	40 arsip		-	-	-	-	-	-
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	7000 Arsip		1 Pearngkat daerah	1 Pearngkat daerah	1,00	1 Pearngkat daerah	2	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)  (%)
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabuapten/ Kota	Jumlah Arsip Statis yang diimput pada SIKN dan JIKN	2500 Berkas		500 Berkas					
2	24	02	2.03	01	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	28000 Pengguna		-	-	-	500 Pengguna	500	0,02
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	380 Unit kerja		76 Unit kerja	76 Unit kerja	1,00	76 Unit kerja	152	0,40
2	24	03			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Diselamatkan dan Dilestarikan	100%							
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang melaksanakan penyusutan	12 Unit Kearsipan							
2	24	03	2.01	01	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	400 Arsip		-	-	-	-	-	-
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	400 Berkas		-	-	-	-	-	-
2	24	04			Program Perizinan Penggunaan Arsip Arsip	Jumlah Pengguna Pelayanan arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	135 Orang		-	-	-	-	-	-
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup yang dipinjamkan	400 Berkas		-	-	-	-	-	-
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	4 SOP		-	-	-	-	-	-
2	24	04	2.01	02	Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	8 Arsip		-	-	-	-	-	-

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung**

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung memiliki tujuan agar terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai dengan :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan.
- Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna
- Meningkatnya pemanfaatan arsip
- Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan
- Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja ataupun renja yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka waktu 1 (satu) tahun. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk mendapatkan data yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama) ditetapkan antara lain sebagai alat pemantauan dan pengendalian kinerja program dan kegiatan. Adapaun IKU (Indikator Kinerja Utama) dinas kearsipan dan perpustakaan yang telah ditetapkan sesuai bidang urusan kearsipan dan perpustakaan yang memiliki 1(satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan dan memiliki 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

Indikator

Tujuan : - Indek kearsipan  
- Pertumbuhan minat baca

- Sasaran :
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan
  - Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna
  - Meningkatnya pemanfaatan arsip
  - Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan
  - Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan
  - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Indikator

- Sasaran :
- Persentase nilai pengawasan internal
  - Persentase penambahan khasanah arsip statis
  - Persentase arsip yang dipinjam
  - Persentase kunjungan ke perpustakaan
  - Persentase penambahan khasanah koleksi
  - Nilai AKIP

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi Pelayanan secara langsung maupun tidak langsung baik itu kepada Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat yang memerlukan Pelayanan kearsipan dan pelayanan perpustakaan. Dinas kearsipan dan perpustakaan memiliki dua urusan yaitu urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung urusan pemerintahan bidang perpustakaan seperti di bawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Evaluasi kinerja perangkat daerah



1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan bahan logistik kantor
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dilaksanakan untuk kelancaran pengelolaan dan pelayanan administrasi urusan dinas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan :

2.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik.
- b. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota.

- c. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
- d. Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota.

Program, Kegiatan dan sub kegiatan kegiatan tersebut di atas sangat menunjang peran perpustakaan sebagai media pembelajaran yang secara tidak langsung mendukung pendidikan. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti di atas kiranya dapat menunjang dan mempermudah proses belajar karena peran perpustakaan yang selalu berusaha untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, mengingat keberadaan perpustakaan sebagai media sarana belajar dan rekreasi bagi masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat sehingga peran perpustakaan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung urusan pemerintahan bidang kearsipan seperti di bawah ini :

1. Program Pengelolaan Arsip.

Kegiatan :

1.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
- b. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis

1.2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis

1.3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan NasionalTingkat Kabupaten/Kota

- a. Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota

Program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas sangat diperlukan untuk dilaksanakan karena berdasarkan kegiatan itu kita dapat melaksanakan penataan/pengelolaan arsip Perangkat Daerah sehingga arsip-arsip tersebut dapat tertata dengan baik sesuai dengan peraturan kearsipan yang berlaku, disamping itu akan mengurangi volume arsip yang ada pada Perangkat Daerah, khususnya arsip in

aktif Perangkat Daerah yang Retensinya 10 tahun karena sudah diserahkan ke lembaga kearsipan/Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Dengan adanya serah terima arsip ini tentunya akan ditemui arsip yang mempunyai nilai guna sejarah

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa hampir semua program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan/penataan arsip pada Perangkat Daerah dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Pelayanan Kearsipan dapat di laksanakan dengan cepat dan tepat. Demikian pula halnya dengan perpustakaan yang dengan tidak langsung menunjang pendidikan sehingga berperan ikut mencerdaskan masyarakat.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung**

Dinas kearsipan dan perpustakaan sebagai lembaga yang bertugas sebagai penyelamat arsip dan membudayakan masyarakat gemar membaca, yang penerapannya berbasis TI tentunya memiliki tantangan dan masalah yang dihadapi.

Adapun masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

#### **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

antara lain :

1. Kurang optimalnya pengelolaan arsip aktif maupun in aktif pada Perangkat Daerah dan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, karena belum semua perangkat daerah menggunakan system pengelolaan arsip berbasis TI

2. Kurangnya perhatian perangkat daerah tentang pengelolaan arsip yang baik karena arsip dianggap tidak penting terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah.
3. Belum optimalnya tenaga pengelola arsip pada masing-masing Perangkat Daerah, dan belum memahami system pengelolaan arsip yang benar dengan berbasis TI
4. Terbatasnya tenaga fungsional arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, sehingga sering terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas kearsipan baik itu dalam pembinaan, bimtek maupun dalam kegiatan penilaian dan penyusutan arsip.
5. Kurang terampilnya tenaga pengelola arsip pada Perangkat Daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, sehingga arsip yang ada pada Perangkat Daerah dan Desa belum di kelola sesuai dengan peraturan kearsipan.

#### **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan Perpustakaan, sehingga belum dapat memberikan pelayanan secara optimal proses layanan perpustakaan.
2. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Badung.
3. Masih rendahnya minat baca masyarakat.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

### **3.1. Tujuan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu mendukung visi Bupati Badung yaitu “Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana”, dan khususnya pada misi ke-2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Gocernment yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi”, dengan sasaran RPJMD “Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel”. Itu semua sebagai acuan untuk menentukan tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung , sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung adalah :

Terwujudnya Tata Kelola Kearsipan yang Baik dan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Dengan menentukan tujuan tersebut diharapkan mampu mendukung tercapainya visi, misi dan sasaran Pemerintah Kabupaten Badung.

### **3.2. Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung mempunyai 6 (enam) sasaran yang mendukung tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan
2. Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna
3. Meningkatnya pemanfaatan arsip
4. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan

5. Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

#### **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, sasaran serta kebijakan yang telah disusun pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, pada perencanaan tahun 2023 dimana telah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2021, dimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengampu dua urusan yaitu urusan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan. Dari dua bidang urusan tersebut didukung satu program, lima kegiatan dan enam belas sub kegiatan yang bersifat rutin. Ada tiga program yang menjadi prioritas yaitu, Bidang urusan bidang perpustakaan terdiri dari dua program, empat kegiatan dan lima belas sub kegiatan, sedangkan urusan bidang kearsipan tiga program, lima kegiatan dan sebelas sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dijabarkan sesuai bidang urusannya seperti dibawah ini.

#### **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan :

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan :

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan :

##### **3. Administrasi umum perangkat daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- b. Penyediaan peralatan rumah tangga
- c. Penyediaan bahan logistik kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan :

- 4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan :

- 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

## 2. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan :

- 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik
- b. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota
- c. Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- d. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
- e. Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota
- f. Pengembangan bahan pustaka



- g. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
- h. Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota

Kegiatan :

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat
- b. Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca
- c. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Kegiatan :

1. Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno
- b. Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

Kegiatan :

2. Pengembangan Koleksi budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara
- b. Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara

**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

1. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan :

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
- b. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis

Kegiatan :

2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI
- b. Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis

Kegiatan :

3. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN
- b. Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota

2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan :

1. Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Sub Kegiatan :

- a. Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
- b. Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Kegiatan :

1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- b. Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

Rencana kerja dan pendanaan sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NAMA PD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.772.293.252				26.368.811.926
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				20.966.346.389				25.035.360.731
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	20.267.545.253				24.013.092.633
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keseuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	9.861.700				18.768.185
2	23	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Diskerpus	6 dokumen	6.652.000	APBD	Kegiatan rutin	6 dokumen	12.585.638
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Diskerpus		0	APBD	Kegiatan rutin		0
2	23	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Diskerpus	6 laporan	3.209.700	APBD	Kegiatan rutin	6 laporan	6.182.547
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	19.161.831.146				21.078.014.260
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Diskerpus	86 orang	19.161.831.146	APBD	Kegiatan rutin	86 orang	21.078.014.260
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	341.438.620				242.934.579
2	23	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Diskerpus	1 paket	46.935.000	APBD	Kegiatan rutin	1 paket	12.565.520
2	23	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Diskerpus		10.568.400	APBD	Kegiatan rutin		2.404.617

2	23	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Diskerpus	4 paket	206.935.628	APBD	Kegiatan rutin	4 paket	104.411.500
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Diskerpus	1 paket	11.423.900	APBD	Kegiatan rutin	1 paket	23.704.942
2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Diskerpus	13 dokumen	65.575.692	APBD	Kegiatan rutin	13 dokumen	99.848.000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Diskerpus		0	APBD	Kegiatan rutin		0
2	23	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>23.866.887</b>				<b>881.045.000</b>
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Diskerpus	1 Unit	0	APBD	Kegiatan rutin		401.045.000
2	23	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Diskerpus	6 Unit	23.866.887	APBD	Kegiatan rutin		480.000.000
2	23	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>30.093.100</b>				<b>76.586.109</b>
2	23	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Diskerpus	2 laporan	12.992.900	APBD	Kegiatan rutin	2 laporan	38.720.499
2	23	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Diskerpus	12 laporan	12.100.200	APBD	Kegiatan rutin	12 laporan	30.004.690
2	23	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Diskerpus	2 laporan	5.000.000	APBD	Kegiatan rutin	2 laporan	7.860.920
2	23	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>700.453.800</b>				<b>1.715.744.500</b>
2	23	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Diskerpus	1 unit	77.219.500	APBD	Kegiatan rutin	1 unit	50.039.500
2	23	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Diskerpus	27 unit	468.924.300	APBD	Kegiatan rutin	26 unit	555.379.000

2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Diskerpus	10 unit	33.000.000	APBD	Kegiatan rutin	10 unit	89.726.000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Diskerpus	35 unit	121.310.000	APBD	Kegiatan rutin	35 unit	320.600.000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Diskerpus	0 unit	0	APBD	Kegiatan rutin	3 unit	700.000.000
2	23	02			<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Indek Pembangunan Literasi Masyarakat</b>		<b>9,57 Nilai indek</b>	<b>556.990.496</b>				<b>783.268.098</b>
2	23	02	2.01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan</b>		<b>5270 Orang</b>	<b>385.745.456</b>				<b>496.377.511</b>
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM: information Technology service management)	Diskerpus	36 Layanan	82.811.840	APBD		36 Layanan	81.435.779
2	23	02	2.01	02	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkatkan daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya	Diskerpus		0	APBD			0
2	23	02	2.01	04	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/ kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Diskerpus		0	APBD			0
2	23	02	2.01	06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Diskerpus	60 Orang	32.769.400	APBD		60 Orang	25.000.000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	Diskerpus	30 Layanan	2.179.600	APBD		30 Layanan	40.000.000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka tercetak yang dicetak dan diadakan	Diskerpus		0	APBD			0

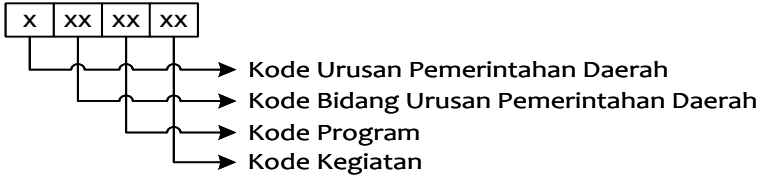
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Diskerpus	1500 eksemplar	86.857.436	APBD		1500 eksemplar	115.066.041
2	23	02	2.01	10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Diskerpus	12 dokumen	181.127.180	APBD		12 dokumen	234.875.691
2	23	02	2.02		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat</b>		<b>60,58 Nilai</b>	<b>171.245.040</b>				<b>286.890.587</b>
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Diskerpus		0	APBD			0
2	23	02	2.02	03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah orang yang mendapat penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Diskerpus	3 Orang	72.764.000	APBD		3 Orang	182.402.207
2	23	02	2.02	04	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	Diskerpus	2 perpustakaan	98.481.040	APBD		2 perpustakaan	104.488.380
2	23	03			<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>	<b>Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan</b>		<b>25 %</b>	<b>141.810.640</b>				<b>239.000.000</b>
2	23	03	2.01		<b>Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat</b>		<b>30 Naskah</b>	<b>141.810.640</b>				<b>154.000.000</b>
2	23	03	2.01	01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Diskerpus	2 orang	141.810.640	APBD		2 orang	154.000.000
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Diskerpus		0	APBD			0
2	23	03	2.02		<b>Pengembangan Koleksi budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara</b>		<b>500 Eksemplar</b>	<b>0</b>				<b>85.000.000</b>

2	23	03	2.02	01	Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	Diskerpus		0	APBD			56.000.000
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan	Diskerpus		0	APBD			29.000.000
2	24				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>805.946.863</b>				<b>1.333.451.195</b>
2	24	02			<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik</b>		<b>30 %</b>	<b>712.517.110</b>				<b>1.203.451.195</b>
2	24	02	2.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola</b>		<b>15 Unit Kerja</b>	<b>344.648.082</b>				<b>622.336.846</b>
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Diskerpus	150 berkas	124.157.152	APBD		150 berkas	281.845.427
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Diskerpus	325 berkas	115.291.390	APBD		325 berkas	193.491.419
2	24	02	2.01	03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Diskerpus	37 laporan	105.199.540	APBD		37 laporan	147.000.000
2	24	02	2.02		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi</b>		<b>1400 Arsip</b>	<b>137.536.256</b>				<b>278.114.349</b>
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	Diskerpus		0	APBD			0
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Diskerpus	1400 arsip	137.536.256	APBD		1400 arsip	278.114.349
2	24	02	2.03		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabuapten/ Kota</b>	<b>Jumlah Arsip Statis yang diinput pada SIKN dan JIKN</b>		<b>500 Berkas</b>	<b>230.332.772</b>				<b>303.000.000</b>
2	24	02	2.03	01	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Diskerpus	7000 pengguna	83.220.436	APBD		7000 pengguna	153.000.000
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Diskerpus	76 laporan	147.112.336	APBD		76 laporan	150.000.000



2	24	03			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Diselamatkan dan Dilestarikan		25 %	46.116.320				65.000.000
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang melaksanakan penyusutan		3 Unit Kearsipan	46.116.320				65.000.000
2	24	03	2.01	01	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Diskerpus	100 arsip	46.116.320	APBD		100 arsip	65.000.000
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Diskerpus		0	APBD			0
2	24	04			Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Pengguna Pelayanan arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		30 Orang	47.313.433				65.000.000
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup yang dipinjamkan		100 Berkas	47.313.433				65.000.000
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	Diskerpus		0	APBD			
2	24	04	2.01	02	Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Diskerpus	2 arsip	47.313.433	APBD		2 arsip	65.000.000

Keterangan :



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung ini dibuat dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan, panduan, pedoman, pengendali, kontrol dan petunjuk kegiatan operasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2024 diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana apabila didukung oleh persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural serta fungsional pada Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2024 ini telah sesuai dengan Renstra Tahun 2021 – 2026 sehingga dalam implementasinya nanti mulai dari tujuan, sasaran dan dapat berjalan dengan baik serta semua program dan kegiatan yang nantinya ditetapkan dalam APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat direalisasikan sesuai dengan rencana.

Didalam penyusunan Renja ini tentunya terdapat kekurangan-kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran dan kritik untuk penyempurnaan penyusunan renja ditahun mendatang.

  
Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kabupaten Badung  
  
Ni Wayan Kustiani, SH. M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660714 198903 2 012

---

  
BUPATI BADUNG  
  
NYOMAN GIRI PRASTA